

## Wali Kota Bandung Tetap Kedepankan Keputusan Partai

**BANDUNG (IM)** - Wali Kota Bandung, Oded M Danial belum menentukan sikap politiknya untuk maju dalam pemilihan gubernur Jawa Barat pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 mendatang.

Namun sebagai seorang kader partai, ditegaskan dia, akan mengedepankan keputusan partai. Apabila partai memintanya tetap di Kota Bandung, maka dirinya tetap maju di pemilihan wali kota berikutnya.

"Tetapi kalau partai meminta saya untuk ke provinsi, ya saya akan ke provinsi. Termasuk kalau partai meminta saya mengurus partai, tidak kembali menjadi wali kota. Ya

saya harus siap," kata Oded di Pendopo, Jalan Dalem Kaum, Kota Bandung, Jumat (24/9).

Menurut dirinya pun, bahwa saat ini masih terlalu dini untuk membahas hal tersebut. Sebab, dia ingin terlebih dahulu fokus menyelesaikan pekerjaannya sebagai Wali Kota Bandung yang tersisa dua tahun ke depan.

"Begini, saya kan sudah berjanji kepada warga Kota Bandung, dan janji itu amanat yang harus dijalankan. Saya kira pun, membahas hal ini masih terlalu dini. Karena tugas saya sebagai wali kota masih menyisakan dua tahun kurang tiga hari," ucapnya. ● **pur**

## Pemkab Lebak Siapkan Rp6 Miliar untuk Pelaksanaan Pilkades Serentak di 266 Desa

**LEBAK (IM)** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak kini tengah menyiapkan anggaran Rp6 Miliar yang berasal dari APBD Kabupaten Lebak tahun 2021.

Anggaran itu nantinya akan digunakan untuk keperluan pelaksanaan Pemilihan Kepala (Pilkades) Serentak di 266 Desa yang berada di Kabupaten Lebak.

Pilkades yang kini tahapannya telah mencapai penetapan bakal calon kepala Desa itu sendiri ditargetkan akan dilakukan pada bulan Oktober 2021 nanti.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDD) Kabupaten Lebak, Babay Imroni mengatakan, anggaran itu digunakan untuk menyiapkan berbagai kebutuhan pelaksanaan perhelatan demokrasi rakyat itu seperti pengadaan surat suara.

"Ya anggaran yang kita siapkan itu kurang lebih Rp6 Miliar. Itu termasuk untuk pengadaan surat suara," kata Babay kepada Poskota saat ditemui di Pendopo Kecil Pemkab Lebak, Rangkasbitung, Jum'at (24/9).

Selain untuk surat suara, anggaran Rp6 Miliar itu juga digunakan untuk pen-

gamanan serta alat penunjang protokol kesehatan (Prokes), karena pelaksanaannya tentu harus dengan prokes ketat.

Katanya, pelaksanaan Pilkades itu sendiri haruslah dilakukan dengan prokes ketat. Karena mengingat, Pandemi Covid-19 ini masih berlangsung, dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.

"Tentunya harus dilakukan dengan prokes ketat. Karena kita tidak ingin Lebak yang saat ini sudah berada di zona kuning, kembali ke zona orange atau merah karena terdapat klaster baru penularan covid-19 pasca pelaksanaan Pilkades itu," ujarnya.

Babar menyebut, pelaksanaan tahapan Pilkades hingga saat ini sendiri dapat berjalan dengan lancar. Pihaknya hanya mengalami kendala mengenai rekapitulasi data pemilih tetap (DPT) m di setiap Desa yang menggelar Pilkades.

"Saat ini DPT tingkat Kabupaten belum ditetapkan, kita masih menunggu laporan sari pihak Desa. Karena belum semua Desa menetapkan dan melaporkan kepada kami (DPMDD-red)," pungkasnya. ● **pra**



**SIMULASI PEMBUKAAN CANDI RATU BOKO**  
Pengunjung berswafoto di kawasan Taman Wisata Candi (TWC) Ratu Boko, Prambanan, Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (24/9). Simulasi dilakukan setelah TWC Ratu Boko mendapatkan QR Code dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan diizinkan beroperasi secara terbatas oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 DIY di masa PPKM level 3.

## Marak Pinjol Ilegal dan Bank Emok, Sukabumi Bentuk Satgas Khusus

**SUKABUMI (IM)** - Keberadaan pinjaman online (pinjol) ilegal dan bank emok mulai diantisipasi Pemerintah Kota Sukabumi. Salah satunya dengan membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mengantisipasi pinjol dan bank emok.

"Pemda mengantisipasi kondisi yang terjadi di masyarakat dengan semakin maraknya bank emok dan pinjaman online," ujar Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi kepada wartawan, Jumat (24/9). Hal ini disampaikan di sela-sela rapat koordinasi wilayah (Rakorwil) dengan RT dan RW terkait penanganan Covid-19 di Kecamatan Baros.

Istilah bank emok diambil dari bahasa Sunda yang berarti duduk lesehan. Sasaran dari bank emok adalah ibu rumah tangga yang diberi pinjaman. Namun, kerap kali bunganya mengecek. Bank Emok tidak menyalurkan pinjaman kepada perorangan, melainkan kepada suatu kelompok.

Maka, lanjut Fahmi, pemda berinisiatif membentuk satgas mengantisipasi maraknya pinjol ilegal dan

bank emok. Fahmi berharap, keberadaan satgas mampu advokasi dan edukasi warga agar sangat berhati-hati dengan pinjol dan bank emok.

Dalam satgas, ungkap Fahmi, akan terlibat sejumlah unsur dari pemda bersama pemangku kepentingan lainnya serta berbagai komunitas. Dibentuknya satgas ini untuk mencegah warga terjerat bank emok dan pinjol.

Sebab, lanjut Fahmi, pinjol ilegal dan bank emok atau bank keliling cukup memberatkan dengan bunga tinggi. Selain itu untuk pinjol ilegal ketika terlambat membayar maka data warga disebar sehingga membahayakan.

"Aparat RT/RW bisa aktif bagaimana sama-sama mengantisipasi pinjol dan bank emok," kata Fahmi. Nantinya satgas akan memberikan pandangan dari sisi hukum atau advokasi.

Camat Baros, Samiar-to, mengatakan, aparat di wilayah siap mendukung langkah pemkot dalam antisipasi keberadaan bank emok dan pinjol ilegal. Sehingga warga tidak terjerat dengan keberadaan pinjol ilegal dan bank emok. ● **pur**

# 8 | Nusantara



## PAMERAN LUKISAN CERITA PANDEMI COVID-19

Pengunjung menikmati salah satu karya lukisan yang bercerita tentang kehidupan sosial pandemi Covid-19 di Pameran Lukisan di Taman Budaya, Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (24/9). Puluhan seniman memamerkan karya lukisan yang menceritakan kehidupan masyarakat saat pandemi Covid-19.

# Nelayan Cirebon Sulit Melaut Gegara Pantai Disesaki Sampah

Lurah Kesenden, Ruliyanto menyebutkan ketinggian tumpukan sampah di pantai itu mencapai 1,5 meter. Penumpukan sudah terjadi dalam kurun waktu tiga tahun. "Sampah di pantai ini terjadi karena beberapa faktor, tapi yang utama adalah sampah yang terbawa aliran sungai, ya dari hulu," katanya.

**CIREBON (IM)** - Pantai Kesenden dipenuhi tumpukan sampah. Kondisi demikian mengakibatkan pendangkalan di bibir pantai dan muara sungai. Imbasnya aktivitas nelayan setempat terganggu.

Tumpukan sampah di Pantai Kesenden itu berada persis di muara Sungai Kedungpane. Lurah Kesenden, Ruliyanto menyebutkan ketinggian tumpukan sampah di pantai itu mencapai 1,5 meter. Ia mengatakan penumpukan sudah terjadi dalam kurun waktu tiga tahun.

"Sampah di pantai ini terjadi karena beberapa faktor,

tapi yang utama adalah sampah yang terbawa aliran sungai, ya dari hulu ke sini," kata Ruli, di Pantai Kesenden, Kota Cirebon, Jawa Barat, Jumat (24/9).

Dia menjelaskan faktor masyarakat yang membuang sampah langsung ke pantai tak begitu dominan. Sebab, lokasi tumpukan sampah yang jauh dari pemukiman. Ruli mengungkapkan Pantai Kesenden kerap mendapatkan kiriman sampah saat banjir.

"Sampah ini terbawa hingga ke muara. Kemudian terkena ombak dan menumpuk di bibir pantai," ucap Ruli.

Ia menambahkan imbas

tumpukan sampah mengakibatkan pendangkalan di muara sungai dan bibir pantai. Kondisi tersebut membuat nelayan kesulitan melaut. Sebab, pendangkalan muara membuat perahu nelayan kesulitan untuk berlayar.

"Sekarang kita lakukan pengerukan di muara sungai. Kita koordinasi dengan Pemkot Cirebon dan BBWS untuk pengerukan. Sudah tiga hari berjalan," tutur Ruli.

Pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengambil langkah-langkah penanganan. Ia berharap Pantai Kesenden bisa bebas sampah. "Kelurahan memiliki kewenangan yang terbatas. Jadi perlu dilakukan koordinasi untuk mencari solusi," ujar Ruli.

Sekretaris Rukun Nelayan Samadikun Kelurahan Kesenden, Sopyan mengatakan tumpukan sampah di pantai berimbas pada pendapatan nelayan. Sopyan mengaku tak sedikit nelayan Samadikun yang harus mengeluarkan biaya tambahan untuk perbaikan

perahu.

"Baling-baling perahu bisa rusak kalau terkena sampah. Apalagi kalau ada sampah kayu, itu bisa membuat perahu bocor," kata Sopyan.

Selain merusak perahu, menurut Sopyan, pendangkalan akibat sampah itu membuat akses perahu terganggu. Perahu nelayan bisa rusak, bahkan tak bisa jalan akibat pendangkalan. Nelayan Samadikun pun hanya bisa melaut saat air laut dalam kondisi pasang.

"Ya kalau pasang saja melaut. Kadang nunggu berjam-jam di muara untuk bisa kembali ke darat, ya nunggu pasang," ujarnya.

"Hasil tangkapan melaut yang harusnya segar saat dibawa pulang, akhirnya tak segar. Karena menunggu pasang. Itu bisa empat jam. Misal, harga udang yang sekilonya bisa dijual Rp 50 ribu, bisa jadi Rp 35 ribu karena sudah tidak segar," ucap Sopyan menambahkan. ● **pur**

## Ganjil Genap Kendaraan di Bandung Kembali Diberlakukan

**BANDUNG (IM)** - Satlantas Polrestabes Bandung bersama Dinas Perhubungan Kota Bandung kembali memberlakukan kebijakan ganjil genap kendaraan pada akhir pekan ini. Ganjil genap kendaraan dilakukan di lima gerbang tol masuk ke Kota Bandung dan di wilayah Jalan Ledeng arah kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Kabid Pengendalian dan Ketertiban Transportasi (PDKT) Dishub Bandung, Asep Kuswara mengatakan ganjil genap kendaraan dilakukan pada lima gerbang tol masuk ke Bandung. Selanjutnya ditambah dengan ganjil genap kendaraan di Jalan Ledeng arah kawasan wisata Lembang.

"Ganjil genap sekarang itu ada 5 gate dan satu di Ledeng cuma Ledeng Sabtu Minggu kita antisipasi ke tempat wisata, cb (cara bertindak) tidak aglomerasi seperti lima gate itu aglomerasi itu boleh tidak terkena ganjil genap. Kalau ledeng terkena ganjil genap walau pelat D," ujarnya saat dihubungi, Jumat (24/9).

Ia menuturkan, kebijakan ganjil genap kendaraan saat ini

dilakukan untuk yang ketiga kali. Total sebanyak 600 orang petugas diterjunkan untuk melakukan pengamanan dan pengawasan kegiatan ganjil genap tiap hari.

Asep mengatakan ganjil genap kendaraan diklaim efektif dalam menekan mobilitas masyarakat yang hendak masuk ke Kota Bandung. Para pengendara pun dinilai sudah paham dan mengerti dengan aturan itu untuk menekan penyebaran Covid-19.

"Sangat efektif, rata-rata lima gate tol dan satu (Ledeng) 40-45 persen penurunan mobilitas warga masuk ke Bandung. Di rata-ratakan berarti sangat efektif dan berhasil," ujarnya.

Ia melanjutkan, pihaknya selama menerapkan ganjil genap kendaraan tidak memberikan sanksi tilang. Namun dengan mengedepankan sikap humanis pihaknya meminta pengendara memutar balik kendaraan jika terkena ganjil genap.

"Masyarakat udah mulai paham mengerti meski tidak ada sanksi tilang tapi hanya memutar balik. Kita humanis," katanya. ● **pur**

## Bima Arya Langsung Jemput Warganya untuk Vaksin

**BOGOR (IM)** - Wali Kota Bogor, Bima Arya langsung mendatangi rumah warga Kota Bogor untuk divaksin. Vaksinasi Covid-19 dilakukan kepada warga yang enggan untuk divaksin. Melalui akun media sosial, Bima membuat video perjalanannya bersama Kapolresta Bogor Kombes Susatyo untuk menjemput para warga di pemukiman padat penduduk di Kelurahan Tegallega, Bogor Tengah.

Bima mengatakan saat ini, progres vaksinasi Kota Bogor telah mencapai 80% dari sasaran sekitar 819.444 penduduk. Hanya saja, sisa 20% atau sekitar 120.000 dari sasaran itu merupakan warga yang tidak antusias dilakukan vaksin.

"20% ini orang-orang yang sulit karena berbagai alasan, karena lansia, akses ke sentra vaksin jauh atau kurang antusias vaksin," kata Bima, kemarin. Untuk itu, Satgas Covid-19 Kota Bogor meluncurkan tim pemburu vaksin. Di mana para petugas yang diturunkan satuan perempuan dari Polri, TNI, Dishub, hingga Satpol PP. Diharapkan, dengan petugas para perempuan lebih bisa memper-suasi orang-orang enggan vaksin.

Selain petugas, disiagakan juga mobil vaksin untuk mendekati warga yang ingin divaksin namun belum mendapatkan kesempatan ke sentra vaksin dengan berbagai macam kendala.

"Kita pakai kendaraan PCR mobile yang sudah dilengkapi

dengan fasilitas vaksinasi. Kita pakai untuk menjangkau warga yang ingin divaksin namun belum divaksin karena kendala-kendala tertentu. Kalau memungkinkan, warga diajak ke sentra vaksin terdekat atau mobil vaksin keliling. Bagi lansia dan disabilitas, bisa divaksin di rumah. Petugas nanti ada yang door to door juga," jelas Bima.

Sementara, Kapolresta Bogor Kota Kombes Susatyo Purnomo Candro mengatakan, tim pemburu vaksin dari lintas kesatuan ini hadir untuk memberikan pemahaman dan edukasi mengenai vaksin kepada warga. "Dipilih anggota wanita agar lebih humanis. Sehingga bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang vaksin dan juga manfaatnya. Mereka nanti secara bergantian menasar wilayah tingkat RT/RW yangarganya perlu didekatkan dengan menggunakan mobil vaksin," pungkasnya.

Sementara bagi warga lanjut usia dan disabilitas yang tidak memungkinkan untuk berjalan ke mobil vaksin, disiapkan juga petugas untuk melakukan vaksinasi dari pintu ke pintu (door to door) ke rumah warga.

Para petugas menjangkau pemukiman padat penduduk, melewati gang untuk mengajak warga untuk vaksin. Antusias warga sangat tinggi dan merasa terbantu dengan kehadiran mobil vaksin. ● **gio**

## Atasi Banjir, DPUPR Lebak Ajukan Pembangunan Embung

**LEBAK (IM)** - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten mengajukan pembangunan embung untuk mengatasi banjir permukiman di Rangkasbitung.

"Pembangunan embung itu berlokasi di Sentral seluas dua hektare untuk menampung air dari kawasan hulu Cijoro Bendungan," kata Kepala Bidang Dumber Daya Air (SDA) DPUPR Kabupaten Lebak Dade Yan Apriandi di Lebak, Jumat (24/7).

Banjir yang melanda sejumlah permukiman di Rangkasbitung belum lama ini terjadi akibat adanya kerusakan di daerah kawasan hulu, sehingga perlu dilakukan pembangunan embung.

Selama ini, kawasan hulu sudah banyak lahan terbuka sehingga hujan deras lebih dari tiga jam saja

dipastikan kawasan hilir dilanda banjir. Sebab, kata dia, curah hujan tersebut tidak diserap airnya oleh pepohonan karena lahannya sudah gundul dan terbuka. Karena itu, pemerintah daerah melakukan gerakan penghijauan dengan menanam aneka pohon. Selain itu juga saluran drainase menyempit akibat pesatnya pembangunan permukiman baru juga ditambah buang sampah sembarangan.

Banjir yang menerjang permukiman di Rangkasbitung hingga ribuan rumah warga tergenang air dengan ketinggian antara 50 sampai satu meter bisa berlanjut terus jika tidak dibangun embung itu.

Kemungkinan besar pembangunan embung itu lebih tepat di Blok Sentral. Banjir pekan lalu berimbas ke sejumlah permukiman di Rangkasbitung hingga empat hari warga tergenang air, sehingga terpaksa mengungsi ke tempat kerabat.

Sebab, banjir permukiman itu berbeda dengan banjir akibat luapan sungai hingga cepat surut. "Kami berharap pembangunan embung bisa direalisasikan oleh pemerintah setempat, sehingga tidak dilanda kembali banjir," kata Usman, warga Sentral Rangkasbitung. ● **pra**



## PASAR JOHAR SIAP BEROPERASI USAI REVITALISASI

Suasana lapak pedagang yang siap untuk ditempati setelah selesai direvitalisasi di Pasar Johar Semarang, Jawa Tengah, Jumat (24/9). Sebanyak 3.802 pedagang yang telah terverifikasi melalui Dinas Perdagangan Kota Semarang rencananya Sabtu (25/9/2021) dapat menempati pasar tradisional yang dibangun sekitar tahun 1930 oleh arsitek Belanda Herman Thomas Karsten dan mengalami kebakaran pada 10 Mei 2015 itu seusai revitalisasi dengan anggaran APBN sekitar Rp146 miliar untuk tahap pertama dan Rp105 miliar untuk tahap kedua oleh Kementerian PUPR.